



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.2, Desember 2018

KONSTELASI POLITIK DI TAHUN ELEKTORAL

- Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018
- Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal
- Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017
- Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)
- Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019
- Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi
- Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia
- *Marketing* Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018

RESUME PENELITIAN

- Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung
- Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 2	Hlm. 129-320	Jakarta, Desember 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------



Mitra Bestari

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Dewan Redaksi

Redaksi Pelaksana

Sekretaris Redaksi

Produksi dan Sirkulasi

Alamat Redaksi

ISSN

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktik kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018 Moch. Nurhasim	129–142
• Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal Lili Romli	143–160
• Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017 Agus Sutisna dan Idil Akbar	161–178
• Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018) Firman Noor	179–196
• Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019 Ridho Imawan Hanafi	197–213
• Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi Sri Budi Eko Wardani	215–231
• Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia Sri Yanuarti	233–248
• Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018 M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri	249–265
Resume Penelitian	
• Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung Kurniawati Hastuti Dewi, dkk	267–288
• Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Aisah Putri Budiatri, dkk	289–306
Review Buku	
• Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik Mouliza K.D Sweinstani	307–317
Tentang Penulis	319–320
Pedoman Penulisan	321–325

CATATAN REDAKSI

Konstelasi politik menjelang tahun elektoral menjadikan dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal menarik untuk dikaji.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 8 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama berjudul “Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018” yang ditulis oleh Moch. Nurhasim. Artikel ini membahas tentang Pilkada serentak 2018 yang menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya dan bahkan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Artikel kedua ditulis oleh Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, memperlihatkan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Agus Sutisna dan Idil Akbar berjudul “Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017” membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Artikel keempat yakni “Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018” ditulis oleh Firman Noor. Artikel ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarkan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019” yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi. Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih.

Sementara itu, artikel “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi” yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.

Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti berjudul “Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia” membahas mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim kemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka

dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

Artikel terakhir yakni ditulis oleh Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri berjudul “Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018” membahas mengenai isu agama yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017. Naskah pertama ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi, “Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung”. Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

Naskah kedua, “Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Tulisan ini membahas mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi yang telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi

penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Danny Hayes & Jennifer L. Lawless, “Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi Politik”. *Review* yang ditulis Mouliza K.D Sweinstani menelaah respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca

sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu politik di tahun elektoral. Selamat membaca.

Redaksi

REVIEW BUKU

MITOS DAN REALITA PEREMPUAN DALAM PEMILU: PELAJARAN DARI SITUASI POLITIK AMERIKA DI ERA POLARISASI POLITIK

MYTH AND REALITY OF WOMEN RUNNING FOR ELECTION: LEASON LEARNED FROM THE U.S. POLARIZED POLITICAL ERA

Mouliza K.D Sweinstani

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: moulizadonna@gmail.com

Diterima: 13 September 2018; Direvisi: 2 Oktober 2018; Disetujui: 30 Desember 2018

Judul Buku : Women On The Run: Gender, Media, and Political Campaigns in Polarized Era
Pengarang : Danny Hayes & Jennifer L. Lawless
Penerbit : Cambridge University Press
Tahun Terbit : 2016
Tebal : 185 + xiii

Abstract

The purpose of this book review is to dissect a book written by Danny Hayes and Jennifer Lawless entitled Women on the Run: Gender, Media, and Political Campaigns in Polarized Era. This book was written by them in response to the American political situation relating to the existence of women in US political life, especially in two in-between elections in 2010 and 2014. This book also provides a new perspective on the political area in the polarized era in the United States by uncovering the conventional understanding of the bias that must be faced by women in politic. Besides, this study tries to find out what actually causes the still-biased understanding of gender in US political area. However, the conclusions of this book need to be used carefully so that readers do not generalize on political conditions that have been considered gender neutral and non-discriminatory as happened in the American political landscape. Readers should contextualize the political landscape in their respective regions in order to produce findings that can confirm or even correct Hayes and Lawless's findings by adding several other variables. Thus, this can enrich studies of political campaigns, media and women candidates in the study of political science.

Keywords: *the polarized era, political campaign, gender neutral, voter behavior*

Abstrak

Tujuan dari penulisan tinjauan buku ini adalah untuk membedah buku yang ditulis oleh Danny Hayes dan Jennifer Lawless yang berjudul *Women on the Run: Gender, Media, and Political Campaigns in Polarized Era*. Buku ini ditulis oleh mereka sebagai respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman

bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca sebaiknya mengontekstkan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Kata kunci: era terpolarisasi, kampanye politik, netral gender, perilaku pemilih

Pendahuluan

Mengupayakan kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat terlibat aktif dalam politik dan proses pengambilan keputusan politik merupakan hal yang masih memerlukan perhatian khusus oleh para pemangku kepentingan di berbagai negara di dunia. Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan hal tersebut adalah masih terdapatnya ketimpangan komposisi antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga perwakilan. Menurut Shvedova¹, perempuan di seluruh dunia pada setiap tingkatan sosio-politik masih merasa bahwa dirinya kurang terwakili dalam parlemen. *Inter-Parliamentary Union* (IPU) menambahkan, selain perempuan masih kurang terwakili dalam politik, perempuan juga mengalami diskriminasi dan kekerasan di ruang publik. Jikalau ada perempuan yang berhasil duduk dalam parlemen, makahal tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Shvedova, mereka pun masih jauh dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pada data IPU pada 1 Januari 2018, rata-rata jumlah keterwakilan perempuan di parlemen di dunia adalah sebesar 23.4%. Angka tersebut tentunya masing berada di bawah standar minimal *critical mass* yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia dalam *Beijing Platform For Action*, yaitu minimal 30%. Masih rendahnya kehadiran perempuan dalam parlemen di berbagai negara antara lain disebabkan oleh adanya stereotipe yang menyatakan bahwa politik bukanlah dunia perempuan. Pandangan tersebut praktis telah meminggirkan peran perempuan dalam bidang ini. Lebih lanjut, anggapan bahwa politik dan

perilaku politik adalah aktivitas yang bersifat maskulin, semakin mengeksklusikan perempuan dalam dunia ini karena maskulinitas tidak pernah dianggap sebagai bagian dari dari karakteristik ideal seorang perempuan.² Asumsi inilah yang sering digunakan untuk membatasi peran perempuan di berbagai sektor publik termasuk menganggap perempuan sebagai *liyan*³ dalam politik. Perempuan selanjutnya hanya diidentikkan dengan urusan domestik yang menganggap hanya hal-hal yang berkaitan dengan ruang domestiklah yang merupakan tugas utama dan satu-satunya yang dapat dilakukan oleh perempuan.⁴

Di samping disebabkan oleh adanya asumsi tentang dunia politik yang *malestream* dan *male-centered*, perihal bagaimana media memotret perempuan yang berkompetisi dalam politik juga seringkali tidak berimbang dan bias. Pemberitaan yang demikian tentunya dapat memberikan pengaruh pada kepercayaan diri kandidat perempuan dan memengaruhi pilihan pemilih. Akhirnya dikarenakan efek domino yang demikian, perempuan pun kembali merasa terdiskriminasi dalam pencalonannya dalam politik dan menyebabkan perempuan tetap menjadi pihak yang kurang terwakili dalam politik.

² Partini, "Partisipasi Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan" *Jurnal Perempuan* Vol 19 No. 2, (Mei 2014), hlm. 41.

³ Istilah *liyan* berasal dari Bahasa Jawa yang oleh Aschroft, Griffith, dan Tiffin (1999) diartikan sebagai pembakuan dari kata dalam bahasa Inggris "the other". *Liyan* dalam teori pasca kolonial merupakan istilah yang sangat penting dalam melakukan definisi terhadap identitas subjek. *Liyan* mengacu pada subjek kolonial yang posisinya diletakkan sebagai manusia marjinal dalam diskursus imperial.

⁴ Juliana Cleves Mosse, *Half the World, Half A Change. An Introduction to Gender and Development*, (Oxford: Oxfarm, 1993), hlm. 199.

¹ Nadezhda Shvedova, "Obstacles to Women's Participation in Parliament." dalam Julie Ballington dan Azza Karam (eds), *Women in Parliament: Beyond Numbers*, (Stockholm, Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005), hlm. 33-50.

Berbagai pemahaman dan asumsi umum mengenai potret bias dan diskriminasi terhadap perempuan dalam pencalonan politik khususnya pencalonan sebagai anggota parlemen tersebut adalah hal yang dikaji oleh Danny Hayes dan Jennifer Lawless dalam buku mereka yang berjudul *Women On The Run: Gender, Media, And Political Campaigns in Polarized Era*. Buku ini merupakan buku yang ditulis berdasarkan pada studi mereka tentang bagaimana dinamika kandidat perempuan dalam pencalonan parlemen Amerika dengan studi kasus pemilu antara pada tahun 2010 dan 2014. Studi tentang pencalonan perempuan dalam parlemen ini mereka lakukan dengan melihat pada tiga variabel utama yang dianggap memiliki pengaruh pada keterwakilan perempuan dalam parlemen. Tiga variabel yang dimaksud adalah konten atau isu kandidat dalam kampanye, pemberitaan media, dan perilaku pemilih. Dengan melakukan studi pada ketiga variabel di atas, mereka hendak membuktikan apakah benar bahwa beberapa hal yang menghambat karir politik perempuan adalah pemberitaan media yang bias, arena politik diskriminatif, dan pilihan pemilih yang berdasarkan pada orientasi jenis kelamin kandidat. Di sisi lain, studi ini juga hendak mengidentifikasi apakah jika ketiga hal diatas tidak benar terbukti, justru terdapat faktor lain yang menyebabkan munculnya bias dalam masyarakat terutama yang berhubungan dengan karir politik perempuan.

Dalam buku tersebut, keseluruhan analisis Hayes dan Lawless dibagi dalam enam bab yang saling berkaitan satu sama lain dimana mereka mengawali kajian mereka dengan membahas tentang Gender, Mitos, dan Realita dalam Kampanye Politik yang berusaha untuk mengungkapkan mitos dan realita tentang gender dalam masa kampanye. Bab kedua mereka mencoba menjelaskan mengenai pemikiran kembali tentang penilaian perbedaan gender dalam kampanye. Selanjutnya pada bab tiga hingga bab lima, mereka menjelaskan mengenai hasil pengujian argumen mereka melalui studi mendalam yang dilakukan selama pemilu antara tahun 2010 dan 2014 terhadap 1.500 kandidat, 400.000 iklan kampanye, dan 50.000 cuitan *Twitter* kandidat peserta pemilu antara tahun 2010

dan 2014. Terakhir pada bab keenam, keduanya menjelaskan mengenai asal mula dan implikasi dari persepsi bias gender dalam pemilu. Bab ini mereka kemukakan karena hasil studi tersebut menunjukkan bahwa di era kepolitikan Amerika yang sudah terpolarisasi menjadi dua kutub kekuatan politik utama, kandidat perempuan ternyata tidak mengalami diskriminasi dan bias selama masa kampanye baik dilihat dari pemberitaan media, konten/isu yang mereka usung, dan perilaku pemilih. Oleh karena itu, pada bab ini mereka mencoba mengemukakan faktor apa yang sebetulnya menjadi penghambat perempuan untuk berkarir di dunia politik jika secara sistematis, tahapan pemilu justru tidak bias. Pembahasan lebih lanjut serta tinjauan penulis atas buku Hayes dan Lawless yang penulis kaitakan dengan kondisi terkini di Indonesia akan penulis elaborasi lebih mendalam pada bagian pembahasan.

Bias dan Seksisme terhadap Politisi Perempuan di Amerika Serikat

Dalam bagian awal buku yang ditulis Hayes dan Lawless, keduanya memberikan gambaran mengenai bagaimana pandangan umum yang terbangun tentang perempuan Amerika Serikat yang turut serta dalam pencalonan politik, baik di tingkat pencalonan presiden maupun parlemen. Menurut Hayes dan Lawless, asumsi publik Amerika Serikat yang terbangun sejauh ini masih mempercayai bahwa perempuan yang mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu di Amerika Serikat masih menghadapi bias, seksisme, dan diskriminasi di hampir seluruh tahapan pemilu. Ironisnya, pandangan yang demikian tidak hanya diyakini oleh publik Amerika Serikat, namun juga oleh para politisi, termasuk politisi perempuan, aktivis perempuan, dan kaum cendekiawan ilmu politik.

Hayes dan Lawless memaparkan beberapa contoh pendapat dari politisi perempuan Amerika Serikat, seperti Michele Bachman, Nancy Pelosi, Allyson Schwartz, Hillary Clinton, dan aktivis perempuan, Jamia Wilson. Berdasarkan pada pendapat masing-masing tokoh tersebut yang didasarkan pada pengalaman politik masing-masing, dapat ditarik kesimpulan bahwa politisi

perempuan di Amerika Serikat merasa dipaksa harus menghadapi bias dan seksisme, terutama oleh media, selama pencalonannya. Mereka menganggap bahwa media di Amerika sejauh ini masih sangat seksis dan misoginis yang mana mereka akui bahwa hal tersebut adalah sebuah kenyataan yang menyedihkan di era Amerika saat ini.⁵ Mereka bahkan menyimpulkan bahwa kekalahan beberapa politisi perempuan dalam pencalonan politik disebabkan oleh identitas “perempuan” yang melekat pada dirinya. Isu “dia adalah perempuan” inilah yang terus digulirkan oleh media ke hadapan publik yang berakibat pada ketidaksiapan masyarakat Amerika untuk mendapatkan pemimpin perempuan.

Bagi mereka yang berpandangan demikian, akar permasalahan dari berbagai pendapat tentang diskriminasi terhadap perempuan dalam politik disebabkan oleh pemberitaan media sangat tidak berimbang dan merugikan perempuan di masa pencalonan politiknya. Mereka menilai bahwa media lebih sering memberitakan hal-hal yang bersifat pribadi dan cenderung mengarah pada penampilan fisik seorang kandidat perempuan dari pada substansi dari isu yang diusung oleh kandidat perempuan. Media yang seharusnya menjadi sarana pendidikan politik masyarakat justru menggiring cara pandang masyarakat menjadi bias dan seksis karena pemberitaan terhadap politisi perempuan yang hanya menitik beratkan pada penampilan perempuan dan identitas dia sebagai perempuan. Hal inilah yang mereka percayai telah memengaruhi pilihan politik pemilih sehingga pemilih tidak memilih dan tidak siap memilih pemimpin perempuan.

Asumsi yang demikian secara nyata berimplikasi pada persepsi publik Amerika Serikat yang menilai bahwa dunia politik merupakan dunia yang lebih sulit bagi perempuan untuk berkarir dibandingkan dengan bidang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey YouGov⁶ yang menyatakan bahwa 58%-60%

publik Amerika Serikat menilai bahwa perempuan yang terjun ke dunia politik akan menghadapi pemberitaan media yang bersifat seksis dan hanya berfokus pada penampilan kandidat perempuan saja. Bahkan hampir setengah dari responden mempercayai bahwa kandidat perempuan harus memiliki kapasitas yang lebih baik dari pada laki-laki. Karenanya, tidak mengherankan jika hampir 1/3 publik akhirnya menyimpulkan bahwa kandidat perempuan tidak akan memenangkan pemilu sesering kandidat laki-laki dan dianggap akan mendapatkan keuntungan finansial yang lebih sedikit dari pada laki-laki dalam pencalonan politiknya. Dengan kata lain, survei tersebut menunjukkan bahwa dalam anggapan publik Amerika Serikat, dunia politik sampai dengan saat ini merupakan dunia yang tidak ramah perempuan.

Isu Politik, Media, dan Pilihan Pemilih: Sebuah Realita

Berbeda dengan pandangan umum tentang wajah politik Amerika Serikat yang dinilai bias, diskriminatif, dan tidak ramah perempuan, hasil studi Hayes dan Lawless justru menunjukkan hal yang sangat berbeda. Menurut mereka berbicara mengenai pencalonan perempuan dalam politik memaksa kita untuk melihat pada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, secara kuantitas perempuan memang masih tergolong kelompok yang kurang terwakili dalam seluruh tingkatan jabatan politik. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam politikpun tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, jika kita melihat pada analisis proses bagaimana mereka mencalonkan diri, dapat diketahui bahwa kandidat perempuan melakukan hal-hal yang juga dilakukan oleh kandidat laki-laki. Mereka juga pada kenyataannya mendapatkan keuntungan finansial, suara, dan kesempatan memenangkan pemilu yang sama dengan laki-laki.

Melihat fakta yang demikian, Hayes dan Lawless menyimpulkan bahwa asumsi tentang dunia politik yang mengeksklusikan perempuan merupakan cara pandang konvensional yang berakar dari pemahaman atas konsep lingkungan politik yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Memang benar bahwa pada masa awal

⁵ Danny Hayes & Jennifer J Lawless, *Women on The Run. Gender, Media, and Political Campaigns in Polarizes Era*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 1-2.

⁶ Berdasarkan pada survey publik yang dilakukan oleh YouGov 43% publik Amerika Serikat menyatakan bahwa perempuan di politik lebih sulit untuk berkarir dibandingkan dengan perempuan dalam jurnanisme. Sementara itu antara 35%-42% menyatakan hal yang sama pada dunia medis, bisnis dan hukum.

Lihat: Hayes dan Lawless, *Women on the Run...*

perempuan Amerika terjun di dunia politik, yaitu sekitar tahun 1970an, perempuan harus menghadapi stereotype, skeptisme dan bias yang menghalangi mereka untuk terpilih. Namun menurut Hayes dan Lawless, situasi politik Amerika Serikat saat ini jauh lebih adil dan ramah terhadap kandidat perempuan, sekalipun hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa perempuan tidak menghadapi bias, seksisme, dan diskriminasi sama sekali pada masa kampanye. Hanya saja, Hayes dan Lawless menekankan bahwa adanya pandangan bahwa kehadiran perempuan dalam politik bukan merupakan hal baru, atau yang dalam Bahasa Hayes dan Lawless disebut dengan *“the declining novelty of female politician”*, telah secara signifikan membuat arena politik Amerika menjadi lebih baik dan lebih ramah terhadap perempuan. Hal lain yang juga mendukung situasi arena politik yang demikian adalah anggapan bahwa perempuan memiliki kompetensi dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memenangkan pemilu. Terlebih, polarisasi partai politik Amerika Serikat yang semakin mengarah pada dua kutub kekuatan politik utama, yaitu Demokrat dan Republikan juga mendukung terciptanya arena politik yang lebih baik bagi perempuan.

Hasil studi Hayes dan Lawless dalam buku tersebut secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga analisis variabel utama. Pertama berkaitan dengan analisis pada kandidat itu sendiri. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa dalam masa kampanye dewasa ini, baik kandidat laki-laki maupun perempuan mengusung isu politik yang sama yang mereka gunakan sebagai strategi kemenangan pemilu masing-masing. Kandidat tidak lagi menawarkan agenda politik yang spesifik yang disesuaikan dengan gender masing-masing seperti pada masa 40 tahun silam. Di era yang lebih terpolarisasi ini, kandidat lebih mengusung isu yang sesuai dengan ideologi partai pengusung, apakah Republikan ataukah Demokrat. Kandidat juga lebih menitikberatkan pada hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama konstituennya bukan pada isu gender tertentu, kecuali pada hal-hal yang sangat luar biasa spesifik gender seperti isu cuti melahirkan. Studi mereka juga menunjukkan

bahwa dalam gaya komunikasi politik kandidat, tidak ada perbedaan antara kandidat laki-laki dan perempuan. Hal yang justru membedakan gaya komunikasi politik dan strategi politik mereka untuk menarik dukungan pemilih adalah latar belakang ideologi partai yang memang mengharuskan mereka berperilaku sebagai layaknya wakil dari ideologi partai itu.

Kondisi di atas tentunya berbeda dengan kondisi karir politik perempuan Amerika Serikat beberapa puluh tahun silam. Pada masa awal partisipasi perempuan sebagai kandidat, perempuan cenderung mengusung isu-isu yang lebih spesifik yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini dilakukan untuk membedakan dirinya sebagai “perempuan” dalam pencalonan politik. Identitas sebagai “perempuan” juga pada saat itu sangat memengaruhi bagaimana gaya komunikasi politik perempuan yang cenderung lebih feminin atau justru sangat maskulin agar dapat mengimbangi lawan politik laki-lakinya. Keseluruhan upaya yang lebih menonjolkan identitas diri sebagai “perempuan” tersebut dilakukan sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari pemilih perempuan. Namun, di era dimana kehadiran perempuan dianggap sebagai kondisi normal dalam kehidupan politik Amerika, publik Amerika melihat kandidat perempuan untuk pertama kali sebagai seorang politisi. Baru kemudian publik melihat dia sebagai seorang perempuan. Karenanya, saat ini identitas perempuan tidak lagi menjadi unsur utama yang memengaruhi penilaian publik terhadap seorang kandidat. Pemilih lebih cenderung melihat bagaimana karakter dia sebagai wakil dari penduduk Amerika. Oleh karena itu, hal ini pun memengaruhi bagaimana perempuan mengusung agenda politik, berkomunikasi dan berstrategi politik. Mereka tidak lagi mendemonstrasikan sisi femininitas (atau maskulinitas), namun lebih kepada kompetensi, kepemimpinan, integritas, empati, dan peka terhadap kebutuhan konstituen secara umum.

Demikian juga dengan pemberitaan media terhadap kandidat laki-laki dan perempuan, studi Hayes dan Lawless menunjukkan bahwa konten berita media saat ini lebih berimbang dibandingkan dengan masa sebelumnya. Media lebih menekankan pada pesan yang dibawa oleh

kandidat dari pada jenis kelamin kandidat. Hal ini antara lain disebabkan oleh isu dan perlakuan terhadap kandidat laki-laki dan perempuan tidak lagi berbeda. Dengan demikian, tidak ada alasan pula bagi media untuk membedakan pemberitaan antara kandidat laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perbedaan gender mereka. Sikap profesional media ini juga tidak lepas dari norma jurnalistik Amerika Serikat yang mendorong jurnalis untuk meliput berita yang berkualitas dan bernilai jual tinggi.

Dengan berorientasi pada norma jurnalistik tersebut, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa media membuat pemberitaan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. *Pertama*, tuntutan media untuk menyajikan berita yang adil. Jika pada kenyataannya tidak ada perbedaan sikap antara kandidat laki-laki dan perempuan, maka hal tersebut juga berarti media tidak berhak untuk membuat berita yang membedakan kandidat laki-laki dan perempuan.

Kedua, dalam era “*declining novelty of women politicians*” dan publik sudah menganggap politisi perempuan sebagai hal yang normal, maka isu mengusung identitas “perempuan” sebagai pembeda satu kandidat dengan kandidat lain menjadi hal yang dianggap tidak memiliki nilai jual pemberitaan yang signifikan. Hal ini tentunya berbeda dengan kondisi beberapa puluh tahun lalu ketika perempuan menjadi aktor baru dalam politik, pemberitaan tentang “perempuan” menjadi hal yang bernilai jual tinggi. Sebaliknya, saat ini hal yang dianggap memiliki nilai jual pemberitaan tinggi menurut media antara lain pencalonan petahana, iklim kompetisi, dan dinasti politik.⁷

Ketiga, polarisasi kekuatan politik yang semakin mengerucut kepada dua aras kekuatan politik di Amerika Serikat menjadi hal yang lebih menarik perhatian media daripada identitas gender kandidat. Hal ini dikarenakan polarisasi tersebut lebih sering memicu munculnya konflik partisan yang jauh lebih menarik perhatian para jurnalis.

Variabel ketiga yang dikemukakan oleh Hayes dan Lawless adalah pilihan pemilih. Menurut Hayes dan Lawless, pemberitaan media

terhadap seorang kandidat merupakan salah satu hal yang dapat sangat memengaruhi pilihan politik publik. Apa yang dipotret oleh media tentang seorang kandidat sangat memengaruhi bagaimana kandidat menilai kandidat tersebut. Dengan demikian, ketika media memberikan gambaran yang bias kepada kandidat perempuan maka hal tersebut juga dapat memengaruhi sikap pemilih untuk memandang sebelah mata dan menilai kandidat perempuan kurang memiliki kompetensi yang baik sebagai seorang anggota parlemen.

Namun, seiring dengan sikap media yang semakin netral dan profesional serta anggapan normal hadirnya perempuan dalam politik, membuat penilaian publik atas kapasitas kandidat yang hanya didasarkan pada perbedaan gender tertentu menjadi tidak relevan. Terlebih era polarisasi politik yang mengarah pada dua kutub kekuatan utama saat ini, membuat publik lebih menilai kandidat berdasarkan keterkaitan dirinya dengan ideologi dan agenda politik yang diusung oleh kandidat tersebut, bukan pada pertimbangan jenis kelamin kandidat. Era menguatnya identifikasi ideologis pemilih dengan partai di Amerika Serikat bahkan telah mematahkan argumen Bachman yang menilai bahwa publik Amerika tidak siap untuk memiliki presiden perempuan. Dengan identifikasi ideologi yang demikian, publik Amerika menyatakan bahwa mereka akan tetap memilih calon presiden perempuan sejauh calon presiden tersebut diusung oleh partai yang mewakili ideologi mereka. Publik juga membantah bahwa mereka menilai kandidat laki-laki jauh lebih memiliki kompetensi dari pada kandidat perempuan.⁸ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di era kepolitikan Amerika Serikat yang semakin terpolarisasi saat ini, pemilih tidak menjatuhkan pilihannya pada jenis kelamin kandidat melainkan pada isu dan kesamaan ideologi yang diusung oleh kandidat.

Fakta dari ketiga variabel yang diujikan oleh Hayes dan Lawless di atas menunjukkan bahwa lanskap politik Amerika Serikat saat ini telah berubah menjadi lebih ramah gender dan netral gender dibandingkan dengan beberapa dekade lalu. Hayes dan Lawless bahkan menilai bahwa

⁷ Danny Hayes & Lawless, *Women on the...*, hlm. 72-73.

⁸ Hayes dan Lawless, *Women on the...*, hlm. 21.

sikap publik Amerika yang telah menganggap kehadiran perempuan sebagai hal yang normal dan wajar dalam dunia politik merupakan wujud modernisasi politik Amerika Serikat. Demikian juga dengan perilaku pemilih yang tidak lagi mendasarkan pilihan politiknya pada gender kandidat, dapat disimpulkan sebagai era menguatnya polarisasi ideologi politik masyarakat Amerika.

Mengapa terjadi Bias?

Setelah mengetahui ketimpangan antara asumsi publik dengan fakta di lapangan tentang pencalonan perempuan dalam pemilu legislatif Amerika Serikat, dalam bab terakhir buku Hayes dan Lawless dijelaskan mengapa muncul asumsi yang diskriminatif tentang arena politik bagi perempuan sementara proses politik yang dilihat dari agenda politik kandidat, pemberitaan media, dan perilaku pemilih sudah tidak lagi bias dan diskriminatif. Menurut hasil studi Hayes dan Lawless, pandangan masyarakat tentang pengalaman perempuan dalam pencalonan politik ternyata tidak berasal dari kampanye yang mereka observasi di daerah mereka sendiri. Hal ini dikarenakan di daerah pemilihan di mana masyarakat itu tinggal, mereka melihat fakta bahwa perempuan dan laki-laki mengusung agenda politik yang sama. Demikian juga dengan konten media lokal setempat yang ternyata tidak bias dan diskriminatif terhadap kandidat perempuan di daerah tersebut.

Pandangan yang menggiring pada *stereotype* bias dan diskriminatif tersebut justru muncul karena ada berbagai faktor yang bersifat lebih makro yang berasal dari luar tahapan pemilu yang tidak berkaitan langsung dengan pencalonan perempuan pada pemilu tersebut. Faktor-faktor yang menurut Hayes dan Lawless memengaruhi penilaian publik terhadap arena politik adalah identitas sosial, terutama yang berkaitan dengan identitas gender dan keterkaitan ideologis pemilih dengan partai, potret pemberitaan dan perbincangan nasional tentang perempuan dalam politik, dan pandangan tentang bias dalam aspek-aspek lain dari masyarakat, seperti bias dalam lingkungan kerja dan pembagian beban reproduktif dalam keluarga.⁹

⁹ Hayes dan Lawless, *Women on the...*, hlm. 117-125.

Oleh karena itu, berdasarkan pada temuan tersebut, dibagian ini Hayes dan Lawless juga memberikan rekomendasi pada *gatekeeper* untuk tidak lagi ragu merekrut kandidat perempuan karena arena politik yang tahapan pemilu yang sesungguhnya tidaklah bias dan diskriminatif seperti asumsi yang selama ini terbangun. Hasil temuan ini juga mereka gunakan untuk meyakinkan kandidat perempuan untuk tidak lagi merasa ragu untuk mencalonkan diri karena arena politik Amerika tidak lagi diskriminatif seperti yang dibayangkan.

Tinjauan Kritis Pemikiran Hayes dan Lawless dalam Praktik Studi Gender dan Politik di Indonesia

Setelah mengetahui hasil studi Hayes dan Lawless dalam buku tersebut, penulis menilai bahwa studi ini telah berhasil memberikan fakta baru yang membongkar asumsi publik mengenai arena politik yang diskriminatif terhadap perempuan. Di sadari maupun tidak, asumsi bias yang demikian sering kali membuat perempuan merasa tidak percaya diri bahkan takut untuk terjun ke dunia politik. Tentunya hal ini dapat menghambat upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Namun, sebagai upaya untuk menambah diskursus tentang pencalonan perempuan dalam politik, penulis perlu untuk memberikan tinjauan kritis atas hasil studi yang dilakukan oleh mereka.

Pertama, studi Hayes menyatakan bahwa di era politik yang telah terpolarisasi, agenda politik yang diusung oleh kandidat perempuan tidak lagi merupakan isu-isu yang spesifik terhadap perempuan namun lebih menekankan pada cerminan ideologi partai pengusung. Jika dilihat dari kacamata studi kepartaian, hal ini menunjukkan bahwa institusionalisasi partai dan internalisasi ideologi partai di Amerika Serikat menunjukkan kondisi yang sudah sangat matang dan sangat baik. Studi ini sekaligus menunjukkan bahwa fungsi partai berjalan dengan baik karena partai berhasil menciptakan kader-kadernya yang patuh pada ideologi partai pengusungnya. Namun, sikap netral gender yang dilakukan oleh kandidat perempuan di Amerika Serikat ini justru bertolak belakang dengan studi-studi

Tabel 1. Persentase Pengeluaran Pemerintah untuk Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Source Public			
Branch Total			
Type of Expenditure Total			
Type of Programme Total			
Measure In percentage of Gross Domestic Product			
Year		2015	2016
Country	Unit		
Denmark	Percentage	28,8	28,7
Finland	Percentage	30,6	30,8
Norway	Percentage	23,9	25,1
Sweden	Percentage	26,7	27,1
United States	Percentage	19,0	19,3

Sumber: OECD.Stat

tentang politisi perempuan di negara lain, seperti di negara skandinavia.

Studi-studi tentang pentingnya perempuan dalam perwakilan politik di Skandinavia justru menunjukkan bahwa kebutuhan perempuan untuk hadir dalam parlemen adalah agar perempuan dapat mengartikulasikan isu-isu spesifik yang berkaitan dengan perempuan. Lebih lanjut, studi tersebut menyatakan bahwa semakin banyak perempuan memimpin atau hadir dalam lembaga perwakilan, maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakat setempat¹⁰. Hal ini dikarenakan ketika duduk di jabatan publik, perempuan cenderung lebih menekankan pada isu-isu kesejahteraan sosial yang di dalamnya meliputi isu-isu spesifik perempuan. Dengan demikian, ketika agenda politik politisi perempuan di Amerika Serikat cenderung lebih netral gender dengan alasan lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, bisa jadi hal tersebut mengindikasikan bahwa politisi perempuan di Amerika justru tidak berperspektif gender dan mungkin akan sulit untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat lebih mendalam dari data perbandingan persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen dan alokasi anggaran pemerintah untuk kebijakan sosial antara negara-negara skandinavia dan Amerika yang terdapat dalam tabel 1.

¹⁰ Helena Svaleryd, *Women's Representation and Public Spending*, IFN Working Paper No.701, (Stochholm: IFN, 2007), hlm. 2-5.

Tabel 2. Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

Peringkat	Negara	%
5	Swedia	43.6
8	Finlandia	42.00
10	Norwegia	41.4
22	Denmark	37.4
100	Amerika Serikat ¹¹	19.8

Sumber : IPU 2018, diakses dari <http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm>

Di samping melakukan tinjauan kritis terhadap hasil temuan Hayes dan Lawless khususnya tentang sikap netral perempuan dalam pengusungan agenda politik pada masa kampanyenya, penulis juga menilai bahwa simpulan yang menyatakan bahwa arena politik saat ini lebih adil bahkan cenderung netral gender perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi. Jika hal tersebut dikontekskan pada negara-negara yang baru memulai kebijakan afirmasi politik bagi perempuan seperti Indonesia, maka hal tersebut dapat menjadi boomerang (*tricky*) bagi kepolitikan Indonesia. Hal ini dikarenakan anggapan politik yang netral gender justru seringkali mengagalkan upaya implementasi kebijakan afirmasi karena kondisi netral ini menganggap bahwa tidak ada masalah dalam

¹¹ Berdasarkan pada data IPU Januari 2018, Peringkat Amerika bahkan lebih rendah satu tingkat dibandingkan dengan Indonesia

akses bagi perempuan pada sumber-sumber kekuasaan. Padahal jika melihat pada makna dari kebijakan afirmasi itu sendiri, kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi diskriminatif yang disebabkan oleh pengalaman historis suatu kelompok. Oleh karena itu, simpulan studi ini perlu untuk dikontekstualkan dengan kondisi nyata di masing-masing daerah/negara. Apalagi jika berbicara pada konteks Indonesia, penggunaan simpulan ini perlu lebih hati-hati untuk digunakan.

Sikap kritis penulis di atas didasarkan pada hasil studi terdahulu yang penulis lakukan pada tahun 2016 tentang rekrutmen caleg perempuan oleh partai Islam dengan studi kasus PPP¹¹ dan studi tentang rekrutmen perempuan Tionghoa dengan studi kasus PDI-Perjuangan pada tahun 2017¹². Berdasarkan studi penulis sebelumnya, diketahui bahwa anggapan kondisi netral gender dalam politik di Indonesia justru dimaknai sebagai celah untuk mengabaikan kewajiban partai untuk mendorong keterwakilan perempuan secara substantif. Secara umum, partai memang membuka diri menerima kandidat perempuan, namun penerimaan dan sikap terbuka tersebut hanya dimaknai sebagai upaya partai untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai peserta pemilu. Padahal, partai seharusnya mampu dan mau memaknai kebijakan afirmasi sebagai upaya partai untuk memberikan perlakuan khusus untuk membina kapasitas perempuan untuk dapat menjadi kader partai yang baik. Sayangnya, berdasarkan kedua studi penulis tersebut, partai tidak memberikan perlakuan khusus bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya maupun memperbesar potensinya untuk terpilih. Oleh karena itu, simpulan Hayes dan Lawless yang menyatakan bahwa kondisi netral gender

menguntungkan keterwakilan perempuan tidak dapat digeneralisasikan untuk kondisi politik di negara lain. Simpulan ini juga perlu untuk hati-hati digunakan oleh publik Amerika karena hal ini dapat melenakan mereka dan justru mengesampingkan perjuangan keterwakilan perempuan. Terlebih, kondisi keterwakilan perempuan Amerika dalam Politik masih cukup jauh dari angka minimal *critical mass* (lihat tabel 2).

Sekalipun penulis memberikan beberapa tinjauan kritis tentang hasil studi Hayes dan Lawless, namun penulis juga memotret adanya pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kondisi kepolitikan Amerika Serikat saat ini yang Hayes dan Lawless simpulkan lebih ramah terhadap perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan profesionalitas media yang memberikan pemberitaan yang berimbang bagi kandidat laki-laki dan perempuan serta perilaku pemilih yang mendasarkan pilihannya pada identifikasi ideologi terhadap partai.

Berkaitan dengan profesionalitas media, norma yang dipatuhi oleh media, khususnya media lokal Amerika, dapat dicontoh oleh media di Indonesia. Berdasarkan pada data yang ditemukan oleh penulis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, dapat disimpulkan bahwa media di Indonesia masih memberikan kesempatan peliputan yang tidak berimbang untuk laki-laki dan perempuan di mana frekuensi pemberitaan kandidat laki-laki lebih sering daripada kandidat perempuan.¹³ Di samping itu, berdasarkan pada studi terbaru tentang citra media terhadap kandidat perempuan, diketahui bahwa media lebih sering mengerangkakan pemberitaan tentang kandidat perempuan pada citra fisik, citra popularitas, dan citra kontras (konflik yang dilakukan oleh perempuan) dari pada substansi agenda politik yang diusung.¹⁴

Sementara itu berkaitan dengan perilaku pemilih, era polarisasi kekuatan politik di Amerika Serikat dapat disimpulkan sebagai

¹¹ Mouliza K.D Sweinstani, *Peran Partai Islam dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Tingkat Nasional: Studi Tentang Partai Persatuan Pembangunan dalam Memenuhi Kuota Minimal Perempuan Sebagai Calon Anggota DPR Tahun 2014*, dalam Prosiding International Conference for Democracy 2016.

¹² Mouliza K.D Sweinstani dan C. Mariyah, "Political Recruitment Of Chinese-Indonesian Women Candidate: Study On PDI Perjuangan Recruitment In Nominating Chinese-Indonesian Woman Candidate In Semarang City Legislative Election 2014," *People: International Journal Of Social Science*, vol. 3, no. 2, (2017): 1156-1174.

¹³ The Indonesian Institute, *Menilik Pemberitaan Kampanye*, <https://www.theindonesianinstitute.com/menilik-pemberitaan-kampanye/>, diakses pada 21 Maret 2018.

¹⁴ Yeni Yuniarti dan Dedeh Fadilah, "Citra Caleg Perempuan dalam Framing Media Online", *MediaTor*, Vol 10, No. 01 (Juni 2017), hlm. 75-86.

wujud terlembaganya partai politik dengan baik. Hal ini dikarenakan partai mampu membentuk kadernya sebagai representasi sesungguhnya dari partai tersebut yang secara tidak langsung hal ini memengaruhi orientasi pemilih menjadi tidak lagi berorientasi pada kandidat namun berorientasi pada partai. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi pemilih di Indonesia yang menurut Jae Hyeok Shin, dengan sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih cenderung berorientasi pada kandidat (*candidate centered*) bukan kepada partai (*partycentered*).¹⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa internalisasi ideologi partai dalam diri kandidat belum sebaik apa yang terjadi di Amerika Serikat. Akibatnya, pemilih di Indonesia seringkali masih menilai bahwa gender seorang kandidat menentukan kualitas kepemimpinannya di mana yang lebih baik biasanya diidentikkan dengan kandidat laki-laki.

Penutup

Secara keseluruhan buku yang ditulis oleh Hayes dan Lawless yang didasarkan pada studi mereka di Amerika pada dua kali pemilu antara yaitu pada tahun 2010 dan 2014, merupakan sebuah studi yang berhasil membongkar asumsi publik yang selama ini menyatakan bahwa arena politik adalah arena yang bias dan diskriminatif terhadap perempuan. Studi Hayes dan Lawless berhasil membuktikan bahwa asumsi tersebut ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi arena politik yang sesungguhnya, karena dalam tahapan pemilu khususnya dalam masa kampanye yang dapat dilihat dari agenda politik kandidat, pemberitaan oleh berita, dan perilaku memilih pemilih, tidak menunjukkan bias yang dimaksud. Implikasi lebih dari studi ini juga perlu untuk diapresiasi karena studi ini dapat memberikan pemahaman kepada *gate keeper* partai politik untuk tidak lagi ragu merekrut kandidat perempuan karena arena politik pada kenyataannya tidak bias seperti yang digambarkan oleh pandangan umum tersebut. Hanya saja, dalam memahami studi ini, pembaca perlu berhati-hati dan tidak mudah menarik

generalisasi bahwa arena politik di seluruh dunia sudah lebih ramah kepada perempuan seperti yang digambar Hayes dan Lawless. Studi ini sangat kontekstual dengan kondisi lanskap politik Amerika Serikat yang sudah matang. Bagi para pembaca, penulis sarankan harus dapat mengontekstkan pula dengan perkembangan politik di negara atau daerah masing-masing.

Terahir, buku ini sangat penulis rekomendasikan bagi siapa saja yang tertarik dengan studi-studi tentang perempuan dan politik khususnya perempuan dalam pemilu. Dengan hasil temuan yang menegaskan pandangan umum tentang wajah politik bagi perempuan, studi ini justru dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, maupun mahasiswa untuk mengembangkan studi lebih lanjut yang berkaitan dengan apa yang sebetulnya menjadi akar permasalahan rendahnya keterwakilan perempuan di daerah masing-masing. Apakah dari pandangan umum dan penerimaan publik atas identitas perempuan di ruang publik, sistem pemilu dan tahapan pemilu, atau justru faktor-faktor lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Aschroft, Bill. Gareth Griffith, dan Helen Tiffin. *The Post-colonial Studies*. Reader: Routledge, 1995.
- Ballington, Julie dan Azza Karam (eds). *Women in Parliament: Beyond Numbers*. Stockholm, Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2005.
- Hayes, Danny & Lawless, Jennifer J. *Women on the Run. Gender, Media, and Political Campaigns in Polarizes Era*. Cambridge: Cambridge University Press. 2016.
- Mosse, Juliana Cleves. *Half the World, Half A Change. An Introduction to Gender and Development*. Oxford: Oxfarm. 1993.

Jurnal dan Prosiding

- Partini. "Partisipasi Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan" *Jurnal Perempuan* Vol 19, No. 2 (Mei 2014).
- Shin, Jae Hyeok. "The choice of candidate-centered electoral systems in new democracies" dalam *Sage Journal* Vol.2, Issue 2 (2017). doi. org/10.1177/1354068815581539.

¹⁵ Jae Hyeok Shin, "The choice of candidate-centered electoral systems in new democracies" *Sage Journal* Vol.2 Issue 2 (2017). doi.org/10.1177/1354068815581539

Svaleryd, Helena. *Women's Representation and Public Spending*, IFN Working Paper No.701. Stockholm: IFN, 2007.

Sweinstani, Mouliza K.D. *Peran Partai Islam Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Tingkat Nasional: Studi Tentang Partai Persatuan Pembangunan Dalam Memenuhi Kuota Minimal Perempuan Sebagai Calon Anggota DPR Tahun 2014*, dalam Prosiding International Conference for Democracy 2016.

Sweinstani, Mouliza K.D dan Mariyah, C. "Political Recruitment Of Chinese-Indonesian Women Candidate: Study On PDI Perjuangan Recruitment In Nominating Chinese-Indonesian Woman Candidate In Semarang City Legislative Election 2014," *People:International Journal Of Social Science*, Vol. 3, No. 2 (2017).

Yuniarti, Yeni dan Fadilah Dedeh. *Citra Caleg Perempuan dalam Framing Media Online*, *MediaTor*, Vol. 10, No. 01 (Juni 2017).

Sumber Online

IPU, *Women in National Parliament; World Classification*, dalam <http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm>.

The Indonesian Institute, *Menilik Pemberitaan Kampanye*, dalam <https://www.theindonesianinstitute.com/menilik-pemberitaan-kampanye/>, diakses pada 21 Maret 2018.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui aisahputrib@gmail.com.

Agus Sutisna

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Muhamamdiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini penulis menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023. Aktif menulis tentang pemilihan dan demokrasi di berbagai jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: tisna_1965@ymail.com.

Firman Noor

Penulis merupakan peneliti senior sekaligus professor riset pada Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Australian National University dan S3 di Universitas Exeter, Inggris. Karya-karya akademisnya banyak diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional maupun buku terkait pemilihan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui Email: firman.noor@yahoo.co.id.

Idil Akbar

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Menyelesaikan pendidikan master Ilmu Politik di FISIP Universitas

Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: idil.akbar@gmail.com

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2007 menyelesaikan program master dari Faculty of Asian Studies Australian National University dan mendapat gelar doktor dari Kyoto University Jepang tahun 2012. Memiliki passion dalam bidang gender dan politik, kepemimpinan perempuan, gender dan desentralisasi, hak-hak asasi perempuan dan anak serta gender, Islam dan demokrasi di Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah diterbitkan dalam jurnal nasional, internasional dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: kurniawati.dewi@yahoo.com.

Lili Romli

Penulis merupakan peneliti senior dan professor riset di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan doctoral ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Kajian yang diminati penulis adalah tentang pemilihan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: liliromli.lipi@gmail.com

M. Fajar Shodiq Ramadhan

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, Surabaya. Beberapa karya tulisnya tentang pemilihan telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: fajarramadhan@ub.ac.id.

Moch Nurhasim

Adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas

Indonesia. Berbagai kajian seputar pemilihan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza K.D Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan pemilihan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Romel Masykuri

Penulis merupakan mahasiswa program magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Dapat dihubungi melalui email: romel.masykuri@gmail.com

Ridho Imawan Hanafi

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008-2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel ridhoimawan@gmail.com.

Sri Budi Eko Wardani

Penulis adalah pengajar di departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Puskapol UI. Kajian peminatan penulis adalah tentang pemilihan, perempuan dan perwakilan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: sbe_wardani@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematisa Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri* dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

